

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015-2021**

Rosy Lilyasari

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Email: rosylilya01@gmail.com

Abstrak

Tingginya penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja yang akan otomatis dapat menghasilkan angkatan kerja yang tinggi. Suatu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang seimbang dengan sumber-sumber kegiatan ekonominya, sehingga akan diperoleh peningkatan pada pendapatan nasionalnya. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2013 mengemukakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Oleh karena itu, masalah dalam ketenagakerjaan masih belum terselesaikan salah satunya yaitu penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah seberapa banyak penduduk suatu daerah yang terserap untuk dapat berkerja di suatu instansi atau perusahaan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadtu dari beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan presentase lapangan pekerjaan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK) Inflasi (INF), Investasi menjadi factor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Inflasi (INF), dan Investasi.

Pendahuluan

Pada suatu negara, jumlah penduduk dengan sumber-sumber ekonominya harus seimbang. Jumlah penduduk yang terlalu sedikit dapat menyebabkan masalah dalam pertumbuhan ekonomi karena dapat menyebabkan kurangnya tenaga kerja dan konsumen untuk mendukung pertumbuhan sector ekonomi. Di sisi lain, jumlah

penduduk yang terlampau banyak dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur, yang nantinya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.(Nur Insana,2019). Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam ekonomi yang mengatakan bahwa keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya ekonomi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Prinsip ini berhubungan dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu tanpa merusak sumber daya alam atau mengurangi kualitas hidup masyarakat.

Ketenagakerjaan adalah bagian dasar yang terdapat di kehidupan setiap manusia yang mencakup aspek social dan ekonomi yang bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan angkatan kerja disuatu daerah. Undang-Undang No 13 Tahun 2013 mengemukakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Masalah dalam ketenagakerjaan menjadi suatu permasalahan yang sulit dan masih mencari solusi guna dapat mengatasi masalah tersebut. Semakin banyaknya penduduk pada usia kerja pasti memerlukan tempat guna lapangan kerja yang cukup untuk dapat menampung tenaga kerja tersebut, akan tetapi fakta di lapangan kerja tidak sesuai. Fenomena seperti ini disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia sehingga penyerapan tenaga kerja yang belum optimal. Mengatasi masalah ketenagakerjaan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sector swasta, dan institusi pendidikan. Sehingga menyebabkan masih banyak angkatan kerja yang menganggur.

Penyerapan tenaga kerja merupakan seberapa banyak penduduk suatu daerah yang telah terserap guna dapat berkerja di suatu industry atau instansi. Angkatan kerja yang telah terserap tersebar di berbagai sector perekonomian karena adanya permintaan tenaga kerja dari berbagai industri dan sector ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada tingkat produktivitas marginal dan kegiatan penambahan modal, peningkatan tenaga kerja, tingkat produktivitas tenaga kerja marginal dan juga dalam perkembangan teknologi (Todaro, 2011). Tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia berada di level 110.000 tenaga kerja per tiap persen. Artinya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 yang sebesar 7,07% dapat diperkirakan hanya dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih sebanyak 800.000 jiwa. Di negara Indonesia pada persebaran tenaga kerja yang tidak merata dapat terjadi karena hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia dengan peningkatan presentase lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2021 sebanyak 2,33 juta orang. Berdasarkan data Laporan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan lapangan kerja paling tinggi terjadi pada sector perdagangan sebesar 15,4% dan sector pertanian sebesar 18,44%. Hal ini dapat berdampak baik terhadap peningkatan aktivitas perekonomian sehingga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.



Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2021*

Grafik 1

Jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021

Ketika penduduk mendapat pekerjaan, maka dampaknya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan lapangan pekerjaan dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah tenaga kerja agar tingkat pengangguran tetap terkendali. Selain peran pemerintah dalam mengatasi penyerapan tenaga kerja, masyarakat pun dapat ikut berperan dengan memperbaiki standar sumber daya manusia yang dimiliki dan keterampilan masyarakat agar dapat diterima dalam perusahaan tertentu. Hasil penelitian ini bahwa Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara parsial. Artinya, ketika indeks persepsi PDRB dan UMK meningkat, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja pula. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi memiliki pengaruh negatif yang berarti peningkatan jumlah penduduk akan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya untuk variabel Investasi tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2021” .

Rumusan Masalah

6. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
7. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
8. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
9. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
10. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum kabupaten (UMK), inflasi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021.

Tinjauan Pustaka

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan keadaan penawaran dan permintaan pada tenaga kerja yang kondisinya seimbang maka bisa memilih standar upah yang seimbang dan penggunaan tenaga kerja secara optimal. Sehingga tenaga kerja yang telah mendapat pekerjaan di berbagai sector ekonomi akan dapat mempengaruhi perbedaan dalam tingkat pendapatan nasional. Menurut Sudarsono dalam penelitian Rofifah (2020) menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang sedang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan tertentu, sehingga penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan pada factor lainnya yang mampu mempengaruhi permintaan hasil produksi, yaitu naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari

perusahaan yang berkaitan, tercermin melalui besarnya produksi, dan harga barang modal seperti mesin.

Teori permintaan menjelaskan mengenai adanya keterkaitan keseluruhan permintaan tenaga kerja dan harga upah. Sehingga dapat disimpulkan, meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja bergantung dengan adanya peningkatan permintaan penduduk dalam jasa dan barang yang di produksi. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja dan upah secara keseluruhan. Sedangkan permintaan dalam tenaga kerja diharuskan memiliki kapasitas maka dapat menjelaskan seberapa banyak permintaan pada tenaga kerja dan kondisi tingkat upah. Oleh karena itu maksud penyerapan tenaga kerja pada penelitian ini merupakan presentase jumlah orang yang memperoleh pekerjaan diberbagai sector. Penelitian ini menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participant Rate*) untuk memperoleh nilai penyerapan tenaga kerja dengan perhitungan berikut :

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia sebagai barometer pencapaian pada pembangunan manusia yang berbasis pada beberapa bagian dasar pada kualitas hidup. Tiga hal yang dapat diukur dalam indeks pembangunan manusia yakni : (1) lamanya hidup yang dapat diukur menggunakan AHH (angka harapan hidup) saat seseorang lahir (2) pendidikan yang dapat diukur atas rata-rata dan angka melek huruf penduduk padausia 15 tahun ke atas dan (3) standar hidup masyarakat diukur menggunakan konsumsi perkapita. Pengukuran kualitas pembangunan dapat mencakup dua dimensi utama yaitu, dimensi fisik (kesehatan dan kesejahteraan) dan dimensi non-fisik (intelektual)(Susanti, 2013). Dengan demikian, perhitungan tingkat konsumtif masyarakat dihitung berdasarkan konsumsi perkapita lalu akan disinkronkan dengan indeks pendapatan. Peningkatan daya beli masyarakat dapat dikatikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada peningkatan stabilitas harga dan naiknya pendapatan. Namun, suatu hal yang ekstrim dapat menyebabkan stabilisasi inflasi yang mana kenaikan pengeluaran rill perkapita sehingga probabilitas naiknya pendapatan absolut ril tidak terjual (Maqin dalam Shifa, 2018).

3. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestic Regional Bruto adalah indikator ekonomi makro yang menggambarkan mengenai kondisi perekonomian suatu daerah. Hasil kegiatan ekonomi yaitu, barang dan jasa yang beroperasi pada wilayah domestic, tanpa melihat asal factor produksi adalah milik penduduk wilayah tersebut dengan produk domestik yang bersangkutan. Menurut BPS (2016), guna dapat mengestimasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang di hasilkan pada suatu wilayah, menggunakan tiga pendekatan yaitu :

- d. PDRB berdasarkan pendekatan hasil produksi.
- e. PDRB berdasarkan pendekatan hasil pendapatan.
- f. PDRB berdasarkan pendekatan hasil pengeluaran.

Menurut badan pusat statistic (BPS), Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) mendefinisikan jumlah hasil output oleh semua kelompok produksi pada daerah tertentu dalam periode tertentu. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan tersebut. Menurut Boediono (Husna, 2015), pertumbuhan ekonomi merupakan proses dalam meningkatkan nilai tambah per kapita dengan waktu yang berkelanjutan.

4. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum adalah nilai upah paling rendah yang diterima para tenaga kerja yang menjadi patokan dalam menentukan pemberian upah seperti upah borongan yang diberikan tidak kurang dari pemberian upah yang sudah ditentukan sebelumnya dan upah yang diberikan harian. Menurut Sumarsono dalam penelitian Nur Insana (2019), tunjangan tetap merupakan upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang tidak berdasarkan pada presensi dan prestasi para tenaga kerja disetiap bulannya. Upah yang diperoleh para tenaga kerja merupakan balas jasa atas kerjanya dalam jangka waktu tertentu. Menurut pernyataan Professor Benhan : *“Upah bisa diartikan sebagai besaran uang yang diperoleh para tenaga kerja dari seorang pemilik usaha sesuai dengan perjanjian. “*

Termuat dalam PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai standar para pengusaha dalam pemberian upah kepada para tenaga kerja :

- e. Menurut Ukuran Waktu
- f. Menurut Ukuran Hasil
- g. Menurut Proporsi gaji dan Strukturnya
- h. Upah Minimum

5. Inflasi

Inflasi merupakan suatu kondisi menurunnya kekuatan daya beli terhadap kesatuan moneter pada periode masa tertentu. Adanya inflasi dikarenakan lebih banyaknya nilai uang yang telah didepositokan yang beredar dibandingkan dengan seluruh barang jasa yang telah ditawarkan. Berdasarkan Bank Indonesia (BI), inflasi merupakan meningkatnya harga secara signifikan dan serentak serta berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka disaat terjadi kenaikan harga yang bersifat sementara, tidak bisa disebut inflasi. Sebagai contoh, harga barang yang naik saat akan hari raya idul fitri, namun, harga kembali normal disaat selepas hari raya idul fitri sehingga kenaikan harga sesaat tersebut tidak bisa disebut inflasi. Apabila dilihat dari intensitasnya, dalam satu periode tahun terdapat empat kategori inflasi, seperti berikut :

- e. Inflasi ringan, kategori inflasi ini timbul apabila tingkat laju inflasinya besarnya dibawah dari 10% setiap tahunnya.
 - f. Inflasi sedang, kategori inflasi ini timbul apabila tingkat laju inflasinya besarnya sekitar 10% hingga 30% setiap tahunnya
 - g. Inflasi berat, kategori inflasi ini timbul apabila tingkat laju inflasinya besarnya sekitar 30% hingga 100% setiap tahunnya.
 - h. Hiper inflasi, kategori inflasi ini timbul apabila tingkat laju inflasinya telah diatas 100% setiap tahunnya.
6. Investasi

Investasi merupakan suatu dana, bantuan, pemasukan yang diharapkan dapat menunjang kondisi perekonomian suatu wilayah dan segera mampu merealisasikan tujuan yang sudah direncanakan dalam suatu perekonomian daerah tersebut. Pengeluaran yang diakibatkan oleh belanja barang modal dan alat-alat atau perangkat untuk meningkatkan kompetensi produksi terhadap barang dan jasa (Karini, 2019). Perlu adanya bantuan dana untuk dapat mampu merealisasikan tujuan dalam proses mendorong peningkatan kondisi perekonomian di suatu daerah. Investasi atau penanaman modal terdiri dari dua bagian yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN merupakan aktivitas investor yang berada di dalam negeri serta memberikan kepercayaan untuk menginvestasikan asetnya pada perusahaan di negerinya sendiri. PMA ialah aktivitas investor dalam menanam investasi melalui perseroan terbatas atas hukum Indonesia yang menggabungkan penanaman modal dalam negeri. Sehingga penelitian ini menggabungkan kedua data PMA serta PMDN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015-2021.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang digunakan dalam dataset ini yaitu data statistic yang bersumber dari data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan *National Single Window for Investment*. Terdapat variabel independen yaitu meliputi indeks pembangunan manusia (IPM), produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum kabupaten (UMK), inflasi dan investasi. Sementara variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi dalam penelitian ini yaitu penyerapan tenaga kerja.

Dalam analisis ini menggunakan bantuan program Eviews 10 yang bertujuan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Data yang digunakan pada penelitian ini dianalisa dengan cara kuantitatif dan menggunakan analisa statistic yaitu regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data tahunan selama 6 tahun dari tahun 2015-2021 (*time series*) dan lima kabupaten/kota Yogyakarta, yaitu Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kota Yogyakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (*cross section*). Secara umum persamaan estimasi regresi untuk data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Dimana:

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Y_{it} | = | Penyerapan Tenaga Kerja |
| α | = | Konstanta |
| $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ | = | Koefisien garis regresi |
| X_{1it} | = | Indeks Pembangunan Manusia |
| X_{2it} | = | Produk Domestik Regional Bruto |
| X_{3it} | = | Upah Minimum Kabupaten/Kota |
| X_{4it} | = | Inflasi |
| X_{5it} | = | Investasi |
| i | = | Lokasi |
| t | = | Waktu |
| e | = | Error |

Sebelum melakukan uji hipotesis, hal pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan pengelolaan data panel adalah dengan menentukan model terbaik yang digunakan untuk memperoleh model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. Model tersebut adalah common effect model, fixed effect model, dan random effect model.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengolahan Data

Uji spesifikasi model dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman menghasilkan estimasi model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Hasil estimasi *Fixed Effect Model* sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi Menggunakan Fixed Effect Model

| Variabel | Coeff. | Std. Error | T.Statistik | Prob. |
|-----------|-----------|------------|-------------|--------|
| C | 742973.1 | 494861.1 | 1.501377 | 0.1458 |
| IPM | 4206.961 | 6147.672 | -0.684318 | 0.5001 |
| PDRB | -0.010075 | 0.011429 | -0.881467 | 0.3865 |
| UMK | 0.131367 | 0.108755 | 1.207917 | 0.2384 |
| Inflasi | -15135.57 | 13461.51 | -1.124359 | 0.2715 |
| Investasi | 891.1522 | 3401.592 | 0.261981 | 0.7955 |

Sumber: *Output Eviews10, (data diolah)*

Berdasarkan hasil yang didapat pada regresi data panel dengan model fixed effect pada table diatas, bahwa variable IPM dan UMK mempunyai pengaruh positif yang signifikan pada perubahan penyerapan tenaga kerja. Sementara pada variabel PDRB dan inflasi mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variable Investasi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pada variabel IPM memiliki nilai koefisien positif dan berpengaruh, yang artinya ketika tingkat IPM naik sebesar 1 persen maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 42,06%. Pada variable UMK memiliki nilai koefisien positif dan berpengaruh, yang artinya ketika tingkat FDI naik sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.13%.

Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki koefisien negative, yang artinya ketika tingkat PDRB naik 1 point maka dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,01 %. Variable Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki koefisien negative, yang artinya ketika tingkat IPM naik 1 persen maka dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,51%. Variabel Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2 Uji Apriori

| Variabel | Hipotesis | Hasil | Kesimpulan |
|----------|-----------|---------|------------|
| IPM | Positif | Positif | Sesuai |

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------------|
| PDRB | Positif | Negative | Tidak Sesuai |
| UMK | Negative | Positif | Tidak Sesuai |
| Inflasi | Negative | Negative | Sesuai |
| Investasi | Positif | Negative | Tidak Sesuai |

Sumber: Data diolah (2023)

Dari hasil uji apriori pada tabel 2 di atas menunjukkan variabel IPM dan Inflasi sesuai dengan hipotesis yang telah di tentukan di penelitian ini. Sedangkan variable PDRB, UMK, Investasi tidak sesuai dengan hipotesis yang telah di tentukan di penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| | |
|--------------------|----------|
| R-squared | 0.882204 |
| Adjusted R-squared | 0.856962 |

Sumber: *Output Eviews10, (data diolah)*

Dari tabel di atas, dapat diketahui nilai Adjusted R-squared sebesar 0.856962 atau 85%. Ini artinya variabel IPM, PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 85%, sementara sisanya sebesar 15% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 4. Uji F-Statistik

| | |
|-------------------|----------|
| F-statistik | 34.94974 |
| Prob(F-statistik) | 0.000000 |

Sumber: *Output Eviews10, (data diolah)*

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas F-Statistik sebesar 0.000000 yang mana nilai tersebut menunjukkan kurang dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa variabel IPM, PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Uji T-Statistik

Tabel 5. Uji T-Statistik

| Variable | t-hitung | t-tabel | Prob | Keterangan |
|----------|----------|---------|--------|------------|
| IPM | 14024.04 | 1.69726 | 0.0476 | Signifikan |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|--------|------------------|
| PDRB | 0.016250 | 1.69726 | 0.0094 | Signifikan |
| UMK | -0.183337 | 1.69726 | 0.1338 | Tidak Signifikan |
| Inflasi | -42610.25 | 1.69726 | 0.0930 | Tidak Signifikan |
| Investasi | -11.74837 | 1.69726 | 0.9982 | Tidak Signifikan |

Sumber: *Output Eviews10, (data diolah)*

- a. Indeks Pembangunan Manusia (X1)
Variabel IPM menunjukkan bahwa t-statistik sebesar -2.069081 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1.69726. Dengan nilai probabilitas kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0476 < 0,05$) dan nilai koefisien positif, ini artinya hipotesis pertama negative. Oleh karena itu, hasil penelitian membuktikan bahwa korupsi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (X2)
Variabel PDRB menunjukkan bahwa t-statistik sebesar 0.016250 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1.69726. Dengan nilai probabilitas kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0094 < 0,05$) dan nilai koefisien negatif, ini artinya hipotesis kedua tidak diterima. Oleh karena itu, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja.
- c. Upah Minimum Kabupaten/Kota (X3)
Variabel UMK menunjukkan bahwa t-statistik sebesar -0.183337 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1.69726. Dengan nilai probabilitas lebih dari $\alpha = 5\%$ ($0.1338 < 0,05$) dan nilai koefisien positif, ini artinya hipotesis ketiga tidak diterima. Oleh karena itu, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel UMK mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan pada penyerapan tenaga kerja.
- d. Inflasi (X4)
Variabel inflasi menunjukkan bahwa t-statistik sebesar -42610.25 lebih kecil daripada t-tabel 1.69726. Dengan nilai probabilitas kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0930 > 0,05$) dan nilai koefisien negatif, ini artinya hipotesis keempat diterima. Oleh karena itu, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Inflasi mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan pada penyerapan tenaga kerja.
- e. Investasi (X5)
Variabel Investasi menunjukkan bahwa t-statistik sebesar -0.987392 lebih kecil daripada t-tabel 1.69726. Dengan nilai probabilitas lebih dari $\alpha = 5\%$ ($0.9982 >$

0,05) dan nilai koefisien negatif, ini artinya hipotesis kelima tidak diterima. Oleh karena itu, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Investasi tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan pada penyerapan tenaga kerja.

Pembahasan

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari uji t menunjukkan nilai koefisien variabel IPM sebesar 14024.041 dan nilai probabilitas 0.0476. Dengan nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.0476 < 0,05$), nilai ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan hasil pada penelitian yang telah dilakukan Shifa Annisa Bella (2018), penelitian tersebut variable IPM terdapat pengaruh yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai IPM meningkat yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan, umur panjang dan standar hidup. Peningkatan pada kemampuan daya beli masyarakat menjelaskan adanya kenaikan kesejahteraan berdasarkan pada naiknya pendapatan dan kestabilan harga sehingga indeks pembangunan manusia dapat mengalami peningkatan. Pada penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan masalah kesenjangan pembangunan yang terjadi di Indonesia antara kota-desa, antar –provinsi, antar-pulau, tetapi yang paling nyata adalah ketimpangan gender. Komnas Perempuan menilai terdapat 365 peraturan daerah yang masih mendiskriminasi perempuan dan kesenjangan upah, posisi manajerial serta pendidikan

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari uji t memperlihatkan nilai koefisien variabel PDRB sebesar 0.01625 dan nilai probabilitas 0.0094. Dengan nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.0094 < 0,05$) nilai ini membuktikan bahwa PDRB tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan Penelitian Rizal Azaini (2014) menunjukkan adanya penambahan pada nilai dari upah dapat mengakibatkan meningkatnya taraf kehidupan yang baik pada seorang buruh/pekerja, namun meningkatnya gaji ini harus disertai dengan peningkatan produksi oleh perusahaan. Perusahaan nantinya melakukan penambahan penggunaan tenaga kerja apabila produksi yang dilakukan kurang maksimal dengan upah yang telah disetujui sesuai perjanjian kerja. Upah memiliki artian yakni hak para pelaku ekonomi seperti buruh/pekerja atas jasa yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak kerja sebagai gaji.

Penyerapan tenaga kerja berkaitan pada seluruh permintaan tenaga kerja dari suatu pemilik usaha/perusahaan tertentu. Apabila output makin tinggi pada suatu usaha/perusahaan sehingga pemilik usaha akan membuka/memperluas tenaga kerja engan jumlah lebih banyak untuk dapat memaksimalkan kegiatan produksinya untuk dapat mengejar peningkatan penjualan.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari uji t memperlihatkan nilai koefisiensi variabel UMK sebesar -0.183337 dan nilai probabilitas 0.1338. Dengan nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.1338 < 0,05$), dari uji t disimpulkan bahwa UMK berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan penelitian Nur Insana (2019) mengenai pengaruh umk, pertumbuhan ekonomi serta rata-rata lama sekolah kepada penyerapan tenaga kerja di Takalar. Didapati hasil variable upah minimum ada pengaruh yang positif serta signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketika standar hidup masyarakat mengalami kenaikan, sehingga upah yang diberikan dari perusahaan untuk pekerja juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu besarnya upah minimum kota/kabupaten telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) sehingga seseorang yang memiliki pekerjaan bisa memiliki pendapatan yang sesuai untuk kebutuhan hidupnya.

Pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari uji t memperlihatkan nilai koefisiensi variabel pertumbuhan populasi sebesar --42610.25 dan nilai probabilitas 0.0930. Dengan nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.0930 > 0,05$), nilai ini menunjukkan Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sejalan dengan penelitian oleh Husnul Maghfira, T. Zulham (2016) yang menganalisis factor ekonomi serta social di Provinsi Aceh sehingga mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Diperoleh hasil variable Inflasi berpengaruh negative namun signifikan penyerapan tenaga kerja. Inflasi dapat terjadi disaat adanya kenaikan terhadap harga harga komoditi yang berlaku secara serentak ikarenakan ketidaksinkronnan diantara program system dan penyediaan komoditi pada tingkat pendapatan penduduk. Namun, ketika peningkatan harga sesaat, tidak bisa disebut terjaddi inflasi. Menurut Sadono Sukirno pada penelitian Ariani (2013) menyatakan bahwa adanya peningkatan harga barang yang berlaku, serentak serta secara berkelanjutan. Inflasi mempunyai tingkatan berbeda antara setiap periodenya maka begitupula dengan setiap negara (Sadono Sukirno, 2001:15). Apabila tingkatan inflasi naik, nantinya akan mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap dikarenakan

perusahaan dapat mengurangi total outputnya sebab tidak dapat terbeli factor utama produksi sehingga perusahaan dapat menurunkan total penggunaan tenaga kerja.

Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari uji t memperlihatkan nilai koefisien variabel pertumbuhan populasi sebesar -1340.255 dan nilai probabilitas 0.9982. Dengan nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.9982 > 0,05$), nilai ini menunjukkan Inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan penelitian penelitian Samuel Randy Tapparan (2017) menganalisis pengaruh dari upah minimum serta investasi kepada penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Diperoleh hasil bahwa penanaman modal tidak memberikan pengaruh kepada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini disimpulkan setiap adanya penanaman modal atau investasi yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat menyerap tenaga kerja. Investasi merupakan aktivitas menanam modal dalam bentuk asset tertentu, para investor ingin mencapai finansial freedom yaitu kondisi dimana para investor tidak perlu lagi bekerja karena telah memiliki asset yang cukup guna dapat memenuhi kebutuhan hidup dimasa mendatang. Investasi ini diperlukan guna dapat memenuhi permintaan penduduk dengan peningkatan kesempatan kerja. Namun, terdapat permasalahan dalam berinvestasi di Indonesia yaitu sulitnya permasalahan perizinan, permasalahan pengadaan lahan dan permasalahan regulasi atau kebijakan di suatu wilayah. Sehingga penelitian ini, Investasi tidak sepenuhnya dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penutup

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara parsial. Artinya, ketika indeks persepsi IPM dan UMK meningkat, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja pula. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan yang berarti peningkatan jumlah penduduk akan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya untuk variabel Investasi tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Saran

Dapat diambil berbagai saran dari kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi akademisi ataupun peneliti selanjutnya
 - a) Diharapkan mampu digunakan sebagai pilihan atau acuan bagi peneliti berikutnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi.
 - b) Diharapkan agar melibatkan variabel lain seperti variabel makroekonomi sebagai pembanding dengan variabel-variabel pada penelitian ini.
2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana guna mengambil suatu kebijakan pada masa mendatang ketika berusaha dalam melakukan peningkatan pada penyerapan tenaga kerja dengan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi Masyarakat

Masyarakat memiliki keinginan dalam mengembangkan keterampilan dan menerima segala pelatihan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, “Ketenagakerjan,” *BPS*, 2023. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/52/268/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-menurut-lapangan-usaha-tahunan.html>
- Jogja Dataku, “Data Statistik Ketenagakerjan,” *BAPPEDA JOGJAPROV*, 2023. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/263-statistik-ketenagakerjan
- R. Hartono, A. Busari, and M. Awaluddin, “Pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb) dan upah minimum kota (umk) terhadap penyerapan tenaga kerja,” *Inovasi*, vol. 14, no. 1, pp. 36–43, 2018.
- I. Ukkas, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Palopo,” *Kelola J. Islam. Educ. Manag.*, vol. 2, no. 2, 2017, doi:

10.24256/kelola.v2i2.440.

DPMPTKP1, “Realisasi Investasi Kulon Progo selama 5 tahun,” *DPMPTKP*, 2020.
<https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1130/realisasi-investasi-2020>

N. Insana, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Takalar,” 2019, [Online]. Available: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/16560%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/16560/1/ANALISIS_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI.pdf

BPS, “Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Investasi),” *Badan Pusat Statistik*. p. 1, 2022. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/indicator/13/793/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html>

T. Pustaka, “Tinjauan Pustaka Tenaga Kerja,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.

KEMENPERIN, “Undang - Undang RI No 13 tahun 2003,” *Ketenagakerjan*, no. 1, 2003.

I. G. A. Indradewa and K. S. Natha, “Pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali,” *E-Jurnal EP Unud*, vol. 4, no. 8, pp. 923–950, 2015, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/44563/pengaruh-inflasi-pdrb-dan-upah-minimum-terhadap-penyerapan-tenaga-kerja-di-provi>

P. Tingkat *et al.*, “The Asia Pacific,” vol. 1, no. 2, pp. 83–88, 2017.

A. Hermawan, “Analisis Pengaruh UMK dalam Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Timur,” no. 125020100111089, 2019.

P. Jawa Tengah, “ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DI,” 2010.

A. Wicaksana and T. Rachman, “濟無No Title No Title No Title,” *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., vol. 3, no. 1, pp. 10–27, 2018, [Online]. Available: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>